

### **BAB III**

## **MUHAMMADIYAH DALAM DINAMIKA POLITIK**

Fakta sejarah menunjukkan, bahwa keterlibatan dan kontribusi Muhammadiyah terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia tidak diragukan lagi. Tokoh-tokoh besar yang lahir dari didikan Muhammadiyah ikut serta membentuk arah dan tujuan bangsa ini. Oleh karena itu, sulit kiranya melepaskan bangsa Indonesia dengan Muhammadiyah sebagai suatu "kesatuan" serta bersama-sama ikut serta mencerdaskan bangsa dan rakyat Indonesia. Muhammadiyah bukanlah partai politik, sebagaimana Nahdlatul Ulama pernah menjadi partai Politik, tetapi Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari perpolitikan bangsa Indonesia. Muhammadiyah mampu membuat "garis demarkasi" tegas, mana wilayah politik dan mana wilayah sosial keagamaan.

Kontekstualisasi dengan elite politik Muhammadiyah, penting untuk dipahami bahwa keterlibatan elite Muhammadiyah di dalam mencerdaskan bangsa dapat dilihat dari, salah satunya, proses Pemilu di daerah-daerah atau bahkan Pemilu di tingkat pusat. Melalui pintu politik, elite Muhammadiyah berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara secara konkret.

### **3.1 Muhammadiyah dan Kontestasi Keterlibatan Umat Islam dalam Pemilu**

Kepentingan Muhammadiyah adalah ingin melihat agama Islam dapat dilaksanakan oleh umatnya secara baik sehingga akan terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya, cita-cita Muhammadiyah itu Cuma satu, bagaimana agar umat Islam

Indonesia ini menjalankan agamanya sesuai al-Qur`an al-Sunnah. Adapun mengenai pemerintahan, partai politik, dan sebagainya Muhammadiyah sebagai ormas tidak mencampurinya. Keterlibatan anggota-anggota Muhammadiyah dalam partai politik bersifat individual dan tidak mewakili Muhammadiyah (Majalah Suara Muhammadiyah, 2002). Cara pandang Muhammadiyah sedemikian rupa bukanlah persoalan mudah, khususnya bagi sebagian aktor politik yang merupakan kader Muhammadiyah, meski diakui juga merupakan persoalan yang biasa saja bagi sebagian lagi. Bagi sebagian, menganggap hal itu merupakan "larangan" berpolitik karena dianggap setengah hati. Tetapi bagi sebagian lagi, justru hal itu merupakan tantangan tersendiri untuk berpikir dan bertindak cerdas bahwa Muhammadiyah perlu memainkan peranan politik yang akomodatif terhadap pemerintah khususnya. Sehingga dengan konteks seperti ini, Muhammadiyah mampu secara jernih mendudukan persoalan-persoalan keummatan dan politik dalam satu sisi ada batas demarkasinya, dan sisi lain merupakan mata uang yang tak bisa dipisahkan. Dari sini, terlihat bahwa akomodatif dalam berpolitik adalah sikap Muhammadiyah.

Bagi Muhammadiyah, kegiatan politik harus menjadi kegiatan integral dari kehidupannya yang utuh. Mengherankan kalau ada muslim yang menjauhi, apalagi membenci, kegiatan tertentu yang menentukan arah kehidupan dan nasibnya, misalnya menjauhi kehidupan ekonomi dan politik. Kegiatan dunia harus direbut dan dikendalikan agar sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1988). Konteks ini, menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah memberi ruang bagi warganya agar memanfaatkan secara baik politik dan ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bermanfaat serta maslahat bagi umat manusia.

Kontekstualisasinya dengan kontestasi politik dalam Pemilu, umat Islam mayoritas sesungguhnya memiliki daya tarik dan daya panggil yang dapat diperhitungkan eksistensinya. Faktanya, justru sebaliknya, seakan ”terpecah” menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing unjuk kekuatan politik sendiri-sendiri. Satu sisi memang demikian, tetapi sisi lain dapat ditelaah lebih mendalam, bahwa justru hal ini membuat proses pendewasaan umat Islam Indonesia ke depan di dalam menapaki proses demokrasi politik di negerinya sendiri. Memang, menurut kajian Muhammad Iqbal Ahnaf, banyak analis meyakini bahwa Indonesia bukan lahan yang subur bagi politik Islam. Minimnya perolehan partai-partai Islam dalam setiap pemilu, dibandingkan dengan perolehan partai-partai nasionalis, dianggap sebagai indikator kegagalan politik Islam dan mencerminkan berakhirnya era politik aliran di Indonesia. Kesimpulan demikian, seakan menegaskan bahwa karakter moderat Islam di Indonesia bersifat konstan atau permanen. Padahal kemajuan dan kemunduran politik Islam tidak hanya ditunjukkan oleh pencapaian elektoral partai Islam. Partai Islam hanyalah salah satu varian perjuangan politik Islam (Muhammad Iqbal Ahnaf, 2016).

Terlepas apakah politik Islam berjaya atau tidak, faktanya umat Islam memiliki sikap responsif terhadap perpolitikan di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Indikasi itu dapat dibuktikan dari pertarungan politik yang tiada habis, misalnya antara partai Islam dan partai nasionalis hingga saat ini masih terus berlangsung. Berdasarkan catatan ini, dapat disimpulkan bahwa sampai kapanpun umat Islam Indonesia, khususnya warga Muhammadiyah, tetap memiliki respon politik yang baik dan cenderung akomodatif oleh karena sikap Muhammadiyah yang terbuka dalam soal itu.

## **3.2 Muhammadiyah dalam Politik Praktis**

### **3.2.1 Politik Era Kemerdekaan**

Menurut Nurcholish Madjid dan Kuntowijoyo, sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin, mengatakan bahwa di antara berbagai gerakan nasional yang paling menonjol adalah Islam. Islam telah menjadikan diri sebagai simbol kebangkitan bangsa dalam menentang penjajahan Belanda. Islam telah menjadi identitas penduduk Indonesia dalam melawan Belanda. Islam telah menjelma menjadi ideologi perjuangan bangsa, dan oleh karena itu selalu bersinggungan dengan kekuasaan (Zainal Abidin, 2011, 65). Islam tidak bisa berjauhan dari politik. Bahkan pada masa penjajahan Belanda seorang sosiolog Belanda bernama S. Hurgronje berusaha memisahkan Islam dan Politik, dengan cara membagi Islam menjadi "Islam Ibadah" dan "Islam Politik". Tapi usaha tersebut gagal total, justru Islam malah menjadi penyedia definisi politik bagi identitas nasional (Bahtiar Effendy, 1998, 62). Inilah yang disebut Kuntowijoyo, bahwa Islam adalah kesatuan yang sadar diri sepanjang sejarah.

Berbicara soal Muhammadiyah di era politik kemerdekaan, penting mendiskusikan terlebih dahulu perjalanan panjang politik era itu. Partai politik sejak era kemerdekaan memegang peranan penting dalam sistem parlementer di Indonesia karena identik dengan perwakilan atau pendelegasian wewenang rakyat melalui para wakilnya di parlemen. Pada intinya, semua penghubung antara konstituen dan anggota parlemen adalah partai politik. Deliar Noer mencatat, bahwa dalam sistem parlementer tahun 1950

atau di bawah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, presiden berkedudukan sebagai kepala negara, tetapi tidak memimpin pemerintahan secara langsung, karena kepala pemerintahan waktu itu adalah Perdana Menteri, yang diduduki oleh Muhammad Natsir (1950-1951), kemudian diganti Soekiman Wirjosendjojo (1951-1952), setelah itu diganti Wilopo (1952-1953), berikutnya Kabinet Ali Sostroamidjojo I (1953-1955), dan dilanjutkan oleh Boerhanuddin Harahap (1955-191956), dan berikutnya Kabinet Ali Sostroamidjojo II yang biasa disebut dengan Kabinet Ali-Roem-Idham, yang terdiri dari unsur PNI, NU dan Masyumi (1956-1957) (Deliar Noer, 1988, 215).

Penting untuk dicatat, bahwa pada masa Kabinet Muhammad Natsir, jabatan Menteri Agama oleh KH. Wahid Hasyim, dari unsur NU dalam Masyumi. Pada masa Kabinet Wirjosendjojo, posisi Menteri Agama dijabat KH. Faqih Usman dari unsur Muhammadiyah dalam Masyumi. Menurut kajian Ahmad Syafi'i Ma'arif, keputusan tersebut mempengaruhi kongres NU di Palembang untuk berpisah dan keluar dari Masyumi. Masa Kabinet Wilopo dan Kabinet Ali Sostroamidjojo, NU telah berdiri sebagai Partai Politik, dan mendapat posisi strategis dalam kabinet. Tercatat sebanyak empat menteri dijabat NU yakni, Wakil Perdana I, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Agraria. Posisi ini tidak pernah dialami masa Kabinet Muhammad Natsir (Ahmad Syafii Maarif, 1996, 40).

Pasca keputusan Kongres NU di Palembang, membuat arah dan situasi politik Islam di Indonesia mempengaruhi kekuatan partai Islam. Hal itu tampak pada Pemilu tahun

1955, partai Islam terpecah menjadi enam partai politik. Lihat tabel berikut.

Tabel 3.11  
Suara dan kursi partai Islam pada Pemilu 29 September 1955  
(Zainal Abidin, 2011, 80).

No	Partai	Suara parlemen	%	Kursi	Suara Konstituen	Kursi
1	Masyumi	7.903.886	20,9	57	7.789.619	112
2	NU	6.955.141	18,4	45	8.989.333	91
3	PSII	1.091.160	2,9	8	1.059.922	16
4	Perti	483.014	1,3	4	465.359	7
5	PPTI	85.131	0,2	1	74.913	1
6	AKUI	81.454	0,2	1	143.907	1
	Jumlah	16.599.786	43,9	116	18.523.053	228

Analisis Zainal Abidin, bahwa kekalahan partai Islam memiliki banyak faktor atau dimensi. Di antaranya adalah faktor politisasi ideologi, deideologisasi Islam, ekonomi dan kemiskinan, melek politik dan multi aliran partai politik Islam serta faktor militerisme. Dalam perjalanan kurun waktu perpolitikan di Indonesia, pada masa Pemilu tahun 1955, menghasilkan empat partai besar, yaitu PNI memperoleh 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, dan PKI mendapat 39 kursi. Terlihat dari penjelasan tersebut, tampak bahwa tidak ada partai yang memperoleh suara mayoritas, maka berdasarkan suara terbanyak, Presiden Soekarno sebagai ketua formatur, menunjuk Ali Sostroamidjojo dan Wilopo sebagai formaturnya. Hasilnya, lahirlah Kabinet Ali-Roem-Idham (PNI, Masyumi dan NU) (Ahmad Syafii Maarif, 2015, 199).

Beberapa pemaparan di atas menunjukkan, bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah, secara personal khususnya, berkontribusi besar terhadap perjuangan bangsa Indonesia masa menjelang kemerdekaan. Dialektika politik yang dimainkan oleh Muhammadiyah memberikan makna dan warna politik tersendiri, misalnya pengejawentahan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar perilaku politik selama ini. Cara beradanya kader-kader Muhammadiyah di beberapa partai, menandakan bahwa mereka sejatinya memiliki Identitas Politik Umat Islam yang berjasa di dalam memajukan bangsa ini menuju kepada bangsa yang bermartabat.

### 3.2.2 Politik Era Orde Baru

Diskursus tentang pemerintahan Orde Baru, tidak terlepas dari soal hubungan politik Islam dan Orde Baru, atau secara umum dapat dikatakan hubungan antara agama dan negara. Tahap awal konsolidasi antar keduanya, mengalami pasang surut, dan dalam hubungannya terdapat tiga sifat. Pertama, sifat antagonistik tahun 1967-1982, pada tahun-tahun ini terjadi hubungan tidak harmonis antara politik Islam dan Orde Baru, tentu semua menyoal tentang ideologi politik. Kedua resiprokal kritis tahun 1982-1985, pada tahun ini hubungan politik Islam dan Orde Baru mulai membaik, sebagaimana terlihat kultur-kultur Islam mulai mendapat perhatian dari Orde Baru (negara), dan ketiga akomodatif, tahun 1985-1994, pada tahun ini tercipta hubungan harmonis karena persepsi Orde Baru (Negara) terhadap Islam bersifat positif begitu pula Islam terhadap Orde Baru (Negara) (Abdul Azis Thaba, 1996, 240; dan M. Din Syamsuddin, 2001).

Menurut beberapa analisis politik, pemilu tahun 1955 dianggap pemilu yang adil, jujur dan demokratis dibanding masa Orde Baru dan masa Pasca Reformasi. Jika diukur dari elektabilitas pemilu tahun 1955, dan pemilu pasca reformasi, jawabannya ada pada Mahkamah Konstitusi. MK adalah sumber referensi sidang kasus pemilu meliputi, *money politics*, *black campaign*, politik rekayasa, intervensi pemerintah, dan perjudian pengusaha. Semua ini dimaknai sebagai wujud dari proses sistem demokrasi modern. Kasus *money politics* diakui melekat dalam demokrasi modern dan telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan (Zainal Abidin,).

Kedua gambaran pemerintahan dua rezim yang berbeda tentu memiliki plus-minus sendiri-sendiri bergantung pada pilihan-pilihan politiknya. Kasus-kasus yang muncul dan bersifat ekstrem seperti penyelewengan kekuasaan, korupsi dan nepotisme merupakan dinamika politik yang mewarnai setiap rezim sejak Orde Lama, Orde Baru hingga belakangan mencuat pada Orde Reformasi. Belum ada penelitian yang pasti soal mengapa perilaku-perilaku politik tersebut senantiasa mewarnai wajah perpolitikan bangsa Indonesia dari Orde ke Orde berikutnya. Tentu tidak adil juga mengklaim sebuah Orde tertentu memiliki tingkat kejahatan politik yang lebih suram daripada yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam pemerintahan tertentu, ikhtiar untuk mewujudkan *good governance* harus senantiasa diupayakan agar rakyat mendapat garansi dan kepastian bahwa demokrasi memiliki sisi positif dibanding konsep lainnya.

### 3.2.3 Politik Era Reformasi

Gerakan Reformasi seringkali ditempatkan sebagai "pintu masuk" utama bagi keterbukaan perpolitikan di Indonesia. Reformasi menjadi *euforia* bangsa Indonesia menjemput impiannya di alam keterbukaan, dan demokrasi yang "seolah" akan berjalan baik. Orde Lama diidentikkan dengan Presiden Soekarno, Orde Baru diidentikkan dengan Presiden Soeharto, dan Reformasi seringkali diidentikkan dengan Muhammad Amien Rais. Tokoh Muhammad Amien Rais, menjadi tokoh sentral dalam gerakan reformasi yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat dan mahasiswa pada khususnya (A. Harun, 2005). Gerakan ini adalah Gerakan Sosial Kerakyatan (*people power*) sebagai bentuk perlawanan atas kekuasaan presiden Soeharto. Sosok Muhammad Amien Rais, pada Sidang Tanwir Muhammadiyah pernah menggulirkan wacana Suksesi Kepemimpinan Nasional pada tahun 1993 (A.M. Fatwa, 2004), saat kekuasaan Presiden Soeharto masih kuat kekuatan politiknya. Usai pernyataan Muhammad Amien Rais yang sangat berani itu, menjadi momentum politik nasional bergerak maju melakukan perlawanan atas kekuasaan Orde Baru untuk digulingkan. Teriakan-teriakan turunkan Soeharto makin menggema. Rakyat menjadi berani bertindak melawan tekanan-tekanan politik, tindakan korupsi dan ketidakadilan selama dialaminya. Pasalnya, selama masa pemerintahan Orde Baru, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi simbol pemerintahan Orde Baru yang berkuasa lebih kurang 32 tahun lamanya.

Secara historis, hubungan Muhammadiyah dan negara sangat dinamis dipengaruhi pelbagai faktor dan orientasi

aktor-aktornya. Ada tiga model relasi Muhammadiyah dan negara sepanjang sejarah perjalanan Muhammadiyah. Pertama, model hubungan Muhammadiyah tidak mencampuri urusan politik. Pendekatan ini diterapkan pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang dibidani Ahmad Dahlan ini tidak terseret pada pilihan gerakan kooperatif dan nonkooperatif dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. Model yang disebut Emmerson sebagai sikap akomodatif ini berlaku pula pada periode pasca Orde Baru.<sup>1</sup>

Kedua, model hubungan Muhammadiyah sebagai subordinasi negara. Model ini terlihat jelas pada masa pendudukan Jepang yang sangat militeristik. Muhammadiyah menempatkan aktor negara sebagai institusi pemaksa yang mendisiplinkan manusia dengan cara-cara kekerasan. Model ini juga berlangsung pada akhir Orde Lama dan dekade pertama Orde Baru. Kekuatan-kekuatan sosial-politik di luar negara dipinggirkan dan hanya menjadi aksesori penguasa (*Ibid*).

Ketiga adalah model hubungan Muhammadiyah yang masuk ke ranah kenegaraan. Pola ini terpotret mulai dari keterlibatan mendirikan partai politik (Masyumi), membidani kelahiran partai politik (PAN), hingga berperan aktif dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Pada masa Reformasi, Muhammadiyah memainkan peran-peran strategis nonparpol dalam koridor masyarakat sipil,

---

<sup>1</sup><http://davidefendi.staff.umy.ac.id/2015/03/05/muhammadiyah-dan-pemerintah/>.

terutama pada periode Amien Rais, Buya Syafii, dan Din Syamsuddin. Pada awal tahun 2003, secara jernih Buya Syafii menuturkan bahwa Amien yang telah berjasa mengeluarkan Muhammadiyah dari subordinasi negara sehingga mampu setara dengan negara (*Ibid*).